

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Myanmar merupakan negara anggota ASEAN yang mendapatkan banyak perhatian dari dunia internasional akibat dari kudeta yang dilakukan oleh junta militer pada tanggal 1 Februari 2021. Permasalahan politik Myanmar tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia pada 5 Februari 2021. Indonesia melalui presiden Joko Widodo meminta agar menteri luar negeri Indonesia dan Malaysia berbicara kepada ketua ASEAN agar dilakukannya pertemuan khusus untuk membahas isu ini dan hal tersebut disetujui oleh PM Muhyiddin Yassin.¹

Indonesia memiliki peran aktif sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan yang ada di ASEAN. Beberapa peran aktif Indonesia diantaranya adalah penyelesaian permasalahan konflik Filipina selatan antar kelompok separatis MNLF (*Moro National Liberation Force*) dengan pemerintah Filipina pada tahun 1996 dan mewujudkan sebuah perjanjian akhir atau *Final Peace Agreement 1996* antar keduanya.² Indonesia juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan Candi Preah Vihear antar Thailand dan

¹ Setkab.go.id, "Pernyataan Pers Bersama Presiden Republik Indonesia Dan Perdana Menteri Malaysia, 5 Februari 2021, Di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta," *Setkab.Go.Id*, 2021, diakses pada 26 Maret, 2022, <https://setkab.go.id/pernyataan-pers-bersama-presiden-republik-indonesia-dan-perdana-menteri-malaysia-5-februari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>.

² Hardi Alunaza SD and Dewa Anggara, "Peran Indonesia Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Filipina Dan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)," *Indonesian Perspective* 3, no. 1 (2018): 52.

Kamboja pada tahun 2011.³ Peran di atas membuktikan bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang besar di ASEAN, sehingga dijuluki sebagai *Primus Inter Pares* di kawasan.⁴ *Primus inter pares* merupakan frasa yang berasal dari bahasa latin yang bermakna “yang pertama diantara yang setara”.

Dalam kasus Myanmar, Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan paling dekat dengan Myanmar di ASEAN. Kedekatan antar keduanya semakin kuat ketika Indonesia menawarkan bantuan teknis dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pertukaran informasi mengenai proses transisi demokrasi yang dilakukan melalui *Bali Democracy Forum (BDF)*, *The ASEAN Inter-parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC)*, ikut sertanya Myanmar dalam *Institute for Peace and Democracy* dan menjadi observer dalam pemilihan umum di Myanmar.⁵ Selain itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat berdialog dengan Myanmar terkait upaya penyelesaian genosida terhadap etnis Rohingya pada tahun 2017 yang menghasilkan terbentuknya satgas *ad hoc* dan diterima dengan tangan terbuka oleh Myanmar.⁶

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 merupakan proyeksi dari rasa tidak terima junta atas angka kemenangan suara yang terlalu signifikan antar partai oposisi dan partai junta. Hal ini dapat dilihat dari Liga

³ Rezky Ramadhan Antuli, Dudi Heryadi, and Teuku Rezasyah, “Analisis Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception Analysis,” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 449–459.

⁴ Amitav Acharya, “Indonesia and The Regional Architecture,” in *Indonesia Matters: Asia’s Emerging Democratic Power*, edisi pertama. (Singapore: World Scientific, 2014), 1–136.

⁵ Windy Dermawan, “Indonesia Constructive Engagement To Support Democracy in Myanmar,” *Jurnal WacanaPolitik* 1, no. 2 (2016): 166–174.

⁶ Ipung Pramudya Setiawan and Made Selly Dwi Suryanti, “Keterlibatan ASEAN Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019),” *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021): 83–97.

Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memperoleh suara mencapai 82% sedangkan partai bagi junta militer yakni Union Solidarity and Development Party (USDP) hanya memperoleh 6% dari akumulasi suara.⁷ Junta militer menilai bahwasanya terjadi kecurangan pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada 8 November 2020. Namun, komisi pemilihan umum Myanmar mengatakan bahwa tidak terdapat bukti dari tuduhan yang dilemparkan oleh junta.⁸ Hal ini kemudian menjadi landasan bagi junta untuk menggulingkan presiden terpilih Aung San Suu Kyi dan merebut kuasa atas pemerintahan di Myanmar secara sepihak. Junta militer yang diketuai oleh Jendral Min Aung Hlaing kemudian mengumumkan status darurat di Myanmar serta mendeklarasikan diri sebagai pemimpin baru Myanmar.⁹

Kudeta yang terjadi mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di Myanmar hingga memakan korban jiwa. Tercatat pada tanggal 11 April 2021 terdapat 701 korban jiwa yang diakibatkan oleh kudeta.¹⁰ Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh junta militer tersebut mendapat respons berbeda dari negara anggota ASEAN. Terdapat tiga bentuk respons dari negara-negara anggota ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara yang menolak

⁷ idntimes.com, “Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar Yang Picu Demo Berdarah,” *Www.Idntimes.Com*, 2021, diakses pada 17 Maret, 2022, <https://www.idntimes.com/news/world/rehia-indrayanti-br-sebayang/kronologi-lengkap-kudeta-Myanmar-yang-picu-demo-berdarah/5>.

⁸ Kompas.com, “Kudeta Militer Myanmar Ini Rentetannya Dari Hasil Pemilu Yang Dituduh Curang,” *Kompas.Com*, 2021, diakses pada 16 Maret, 2022, <https://www.kompas.com/global/read/2021/01/30/135022870/kudeta-militer-Myanmar-ini-rentetannya-dari-hasil-pemilu-yang-dituduh?page=all>.

⁹ Eka Yudha Saputra, “Min Aung Hlaing Klaim Posisi Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Myanmar,” *Dunia.Tempo.Co*, 2021, diakses pada 17 Maret, 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1489941/min-aung-hlaing-klaim-posisi-perdana-menteri-pemerintahan-sementara-Myanmar>.

¹⁰ Aditya iswara Jaya, “Korban Sipil Tewas Di Kudeta Myanmar Capai Lebih Dari 700 Orang,” *Www.Kompas.Com*, 2021, diakses pada 12 Februari, 2022, <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/11/152750770/korban-sipil-tewas-di-kudeta-Myanmar-capai-lebih-dari-700-orang>.

kekerasan dan bahkan mengancam tindakan junta. Kedua yaitu Filipina, Kamboja, dan Thailand menganggap bahwasanya permasalahan yang terjadi di Myanmar merupakan permasalahan internal yang tidak boleh di intervensi. Sementara itu Laos, Vietnam, dan Brunei Darussalam merupakan negara yang memilih untuk tidak memberikan komentar terkait permasalahan yang terjadi di Myanmar.¹¹

Respons Indonesia terhadap kudeta Myanmar melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan bahwa “Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. *To do nothing is not an option.*”¹² Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara pertama yang menginisiasi pertemuan pemimpin negara di ASEAN untuk membicarakan permasalahan yang ada di Myanmar. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang melakukan *shuttle diplomacy* terhadap negara anggota ASEAN dengan tujuan menghasilkan suatu keputusan yang sama dalam penyelesaian masalah kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Dalam upayanya, pada tanggal 16-17 Februari 2021 Indonesia melakukan kunjungan dan dialog bilateral kepada Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN yang membahas mengenai permasalahan Myanmar, keesokan harinya Indonesia melakukan kunjungan ke Singapura dengan bahasan yang sama.¹³ Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Thailand sekaligus pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar yang dipilih oleh Junta yang saat itu berada di Bangkok pada

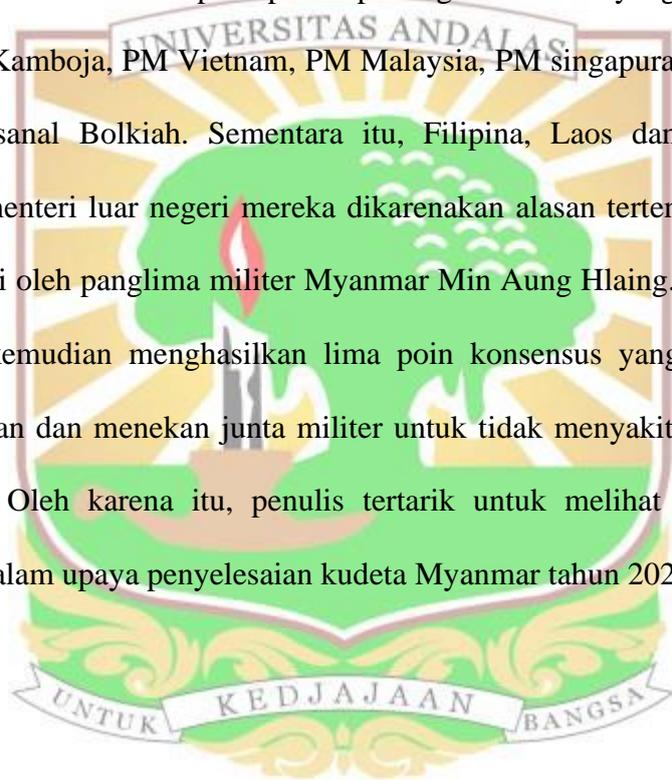
¹¹ Bbc.com, “Kudeta Myanmar: Barat Mengecam, Indonesia Dan Tiga Negara ASEAN Minta Konflik Diselesaikan Melalui ‘mekanisme Hukum’ Dan ‘Dialog Yang Damai,’” *www.Bbc.Com*, 2021, diakses pada 18 Maret, 2022, <https://www.bbc.com/Indonesia/dunia-55887214>.

¹² Kemlu.go.id, “Press Briefing Menteri Luar Negeri Mengenai Hasil Kunjungan Ke Bangkok 24 Februari 2021,” *Kemlu.Go.Id*, 2021, diakses pada 20 Februari, 2022, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2192/berita/press-briefing-menteri-luar-negeri-mengenai-hasil-kunjungan-ke-bangkok-24-februari-2021>.

¹³ Kemlu.go.id, “Kunjungan Menlu RI Ke Brunei Darussalam,” *Kemlu.Go.Id*, 2021, diakses pada 20 Februari, 2022, <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/news/11206/kunjungan-menlu-ri-ke-brunei-darussalam>.

tanggal 24 Februari 2021 untuk membahas permasalahan serupa serta pembahasan mengenai persiapan pertemuan kepala pemerintahan ASEAN.¹⁴

Upaya *shuttle diplomacy* yang dilakukan Indonesia berhasil mewujudkan pertemuan pertama bagi para pemimpin ASEAN secara langsung selama pandemi. Indonesia menjadi negara yang memfasilitasi pertemuan tersebut pada tanggal 24 April 2021 di Jakarta setelah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku ketua ASEAN mengundang negara anggota untuk melakukan *ASEAN Leaders Meeting* atau ALM.¹⁵ Terdapat 6 pemimpin negara ASEAN yang menghadiri ALM yakni: PM Kamboja, PM Vietnam, PM Malaysia, PM Singapura, Presiden RI, dan Sultan Hassanal Bolkiah. Sementara itu, Filipina, Laos dan Thailand hanya mengutus menteri luar negeri mereka dikarenakan alasan tertentu. Pertemuan ini juga dihadiri oleh panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing.¹⁶ Pertemuan yang dilakukan kemudian menghasilkan lima poin konsensus yang bertujuan untuk menghentikan dan menekan junta militer untuk tidak menyakiti masyarakat sipil Myanmar.¹⁷ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta Myanmar tahun 2021.



¹⁴ Kemlu.go.id, "Press Briefing Menteri Luar Negeri Mengenai Hasil Kunjungan Ke Bangkok 24 Februari 2021."

¹⁵ Setkab.go.id, "Diprakarsai Indonesia, Pemimpin ASEAN Akan Gelar Pertemuan Bahas Situasi Di Myanmar," *Setkab.Go.Id*, 2021, diakses pada 22 Februari, 2022, <https://setkab.go.id/diprakarsai-Indonesia-pemimpin-ASEAN-akan-gelar-pertemuan-bahas-situasi-di-Myanmar/>.

¹⁶ cnnIndonesia.com, "Jokowi Dukung Lima Konsensus Soal Myanmar Dari KTT ASEAN," *CnnIndonesia* (Jakarta, 25 April, 2021), <https://www.cnnIndonesia.com/internasional/20210425074829-106-634379/jokowi-dukung-lima-konsensus-soal-Myanmar-dari-ktt-ASEAN>.

¹⁷ cnnIndonesia.com, "Jokowi Dukung Lima Konsensus Soal Myanmar Dari KTT ASEAN,".

1.2 Rumusan Masalah

Di balik kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh junta militer pada kudeta Myanmar 2021 terdapat perbedaan respons dari negara anggota ASEAN. Dari perbedaan respons tersebut terdapat negara yang menolak hingga mengancam tindakan junta, menganggap bahwa yang terjadi di Myanmar merupakan permasalahan internal yang tidak boleh diintervensi, dan bahkan tidak memberikan komentar mengenai hal tersebut. Indonesia sebagai negara yang menyandang gelar *primus inter pares* di kawasan dan merupakan negara yang memiliki hubungan khusus dengan Myanmar. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang melakukan *shuttle diplomacy* guna menyamakan pikiran serta pendapat negara anggota ASEAN agar dapat menghasilkan jalan keluar terhadap kekerasan yang terjadi di Myanmar. Pada 24 April 2021, ALM berhasil dilaksanakan di Jakarta dan menghasilkan lima poin konsensus yang bertujuan untuk menghentikan dan menekan junta militer untuk tidak menyakiti masyarakat sipil Myanmar. Keberhasilan Indonesia dalam mengajak negara anggota ASEAN untuk menghasilkan lima poin konsensus menjadikan Indonesia sebagai negara yang berperan dalam upaya penyelesaian permasalahan kudeta Myanmar tahun 2021.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka pertanyaan yang nantinya akan penulis jawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta Myanmar tahun 2021?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta Myanmar tahun 2021.

1.5 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan bermanfaat secara praktis, yang mana :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi media pengaplikasian ilmu dalam pembelajaran yang telah dipelajari di program studi Hubungan Internasional, serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya terutama pada isu peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta Myanmar tahun 2021.
2. Secara praktis, penelitian ini penulis harap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi kawasan ASEAN serta negara anggota ASEAN yang akan mempertimbangkan atau menentukan posisi dan peranan dalam permasalahan yang terjadi di ASEAN.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan oleh penulis. Studi pustaka nantinya akan membantu penulis dalam meneliti penelitian ini, beberapa sumber bacaan yang menurut penulis relevan dengan tema besar yang penulis teliti, di antaranya:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja melalui Pendekatan National Role Conception Analysis*” oleh Rezky Ramadhan Antuli, Dudi Heryadi, dan Teuku Rezasyah.¹⁸ Dalam artikel ini mereka menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja merupakan konflik saling klaim kepemilikan Candi Prear Vihear yang berada di utara Kamboja, kabupaten Choam Khansant. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat 4 faktor terjadinya konflik, yakni: faktor kepentingan negara, kedaulatan negara, historis, dan politik dalam negeri. Pada saat konflik Thailand – Kamboja, Indonesia merupakan ketua ASEAN dan berperan aktif dalam penyelesaian konflik. Indonesia menjadi mediator dengan melakukan *shuttle diplomacy*, dan menjadi fasilitator dalam tiap pertemuan bilateral antar kedua negara. Berdasarkan konsep Holsti dalam tulisan ini Indonesia berperan dan bertindak sebagai *Mediator-Integrator* yang menyelesaikan konflik dengan cara diplomatis. Kemudian, permasalahan ini dipercayakan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Indonesia hal ini disebut dengan *Role Prescription* atau saran/rekomendasi eksternal. Posisi atau *Position* Indonesia sebagai ketua ASEAN yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memainkan peranannya dengan baik. Terakhir, *role performance* yang dimiliki oleh Indonesia berupa tindakan nyata Indonesia dalam menjalankan peran sebagai mediator dan fasilitator.

Tulisan ini menyajikan peranan Indonesia dalam penyelesaian konflik yang ada di ASEAN dan menjabarkan bagaimana peran Indonesia menggunakan kerangka pemikiran *National Role Conception* milik Holsti. Maka dari itu tulisan ini

¹⁸ Antuli, Heryadi, and Rezasyah, “Analisis Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception Analysis.”

berkontribusi dalam proses penelitian yang akan penulis laksanakan kedepannya dalam alur berpikir penulis. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada kasus, di mana kasus yang akan penulis teliti adalah konflik kudeta Myanmar tahun 2021 sedangkan kasus pada tulisan ini adalah Thailand – Kamboja.

Tulisan kedua adalah “*The Februari 1. 2021 Coup d’Etat in Burma: Some Reason Why*” yang ditulis oleh Donald M. Seekins.¹⁹ Tulisan ini berisikan mengenai peristiwa kudeta yang dilakukan oleh junta militer terhadap pemerintahan terpilih di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021. Dalam tulisan ini Seekins menjelaskan bahwa penangkapan pada masa kudeta 2021 merupakan yang kemosotan kali ketiga bagi Aung San Suu Kyi. Seekins juga menemukan bahwa terdapat keterlibatan Tiongkok dalam permasalahan yang terjadi di Myanmar. Tiongkok melakukan kerja sama di tengah terjadinya konflik dan memberikan bantuan pendanaan pembangunan.

Tulisan ini menjadi masukan bagi peneliti dalam penggambaran peristiwa kudeta militer Myanmar. Nantinya, pembeda antara tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus utama dalam tulisan. Apabila tulisan ini berfokus pada apa yang terjadi di Myanmar pada kudeta tahun 2021, maka penulis akan berfokus pada peran Indonesia dalam upaya penyelesaian permasalahan sebagai reaksi terhadap konflik yang digambarkan pada tulisan ini.

¹⁹ Donald M. Seekins, “The Februari 1, 2021 Coup d’Etat in Burma: Some Reasons Why,” *Asia-Pacific Journal: Japan Focus* 19, no. 6 (2021).

Tulisan ketiga adalah “*Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar*” oleh Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong, dan Trilke E. Tulung.²⁰ Tulisan ini berisikan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Rohingya yang dipengaruhi faktor eksternal dan internal, di mana faktor internal adalah adanya kepentingan nasional Indonesia dalam ideologi yang dipegang oleh Indonesia, sedangkan faktor eksternal berasal dari tekanan Internasional terhadap negara anggota ASEAN dan juga kepentingan Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional. Tulisan ini menjelaskan bahwa kepentingan ideologi dan politik luar negeri Indonesia menjadi landasan bagi Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Ideologi Indonesia sebagai negara dengan prinsip bebas aktif tergambar dalam sikap Indonesia yang tidak memihak kepentingan negara-negara *big power* (China dan AS) yang ikut andil dalam permasalahan kasus Rohingya di Myanmar, dan tidak setengah hati dalam menghasilkan dan merealisasikan komitmen politik terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di Rohingya. Indonesia telah melalui hampir seluruh jalur untuk menyelesaikan konflik di Myanmar, seperti: diplomasi, kerja sama bilateral, multilateral, forum regional, forum solidaritas, serta melakukan kolaborasi bersama NGO.

Hasil dari tulisan yang menggambarkan bagaimana kebijakan luar negeri, ideologi, dan politik luar negeri Indonesia dan kaitannya dalam upaya penyelesaian konflik Myanmar. Hal tersebut memberikan gambaran bagi penulis dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Tulisan ini juga ikut membantu penulis dalam

²⁰ Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P Lengkong, and Trilke E Tulung, “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Jokowi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Di Myanmar,” *JURNAL POLITICO* 8, no. 4 (2019).

penelitian yang akan penulis laksanakan sehingga hasil data dalam tulisan ini akan menjadi bahan penulisan. Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian penulis adalah fokus dan isu utama, di mana tulisan ini membahas isu Rohingya sedangkan yang akan penulis teliti adalah isu kudeta Myanmar.

Tulisan keempat adalah artikel jurnal berjudul “*Indonesia Constructive Engagement To Support Democracy in Myanmar*” yang ditulis oleh Windy Dermawan.²¹ Tulisan ini menjelaskan bagaimana Indonesia melakukan pendekatan konstruktif untuk mendukung demokrasi di Myanmar. Indonesia pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kebijakan “*thousand friends, and zero enemy*” berhasil diterima masuk oleh Myanmar pada tahun 2012. Pada saat itu, Jusuf Kalla bersama dengan PMI menjadi satu-satunya negara yang mendapat izin masuk di tengah krisis HAM yang terjadi. Tulisan ini juga menjelaskan bahwa Indonesia berperan besar dalam proses transisi politik Myanmar yang semula adalah otoriter menjadi demokrasi. Dalam pelaksanaannya Indonesia memperkenalkan demokrasi melalui cara persuasif yang tidak memaksa dengan cara menjadi *technical assistance* bagi demokrasi Myanmar dan menjadi Observer dalam pelaksanaan pemilu di Myanmar.

Tulisan ini menyajikan peran Indonesia dalam penerapan demokrasi di Myanmar dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar yang tentunya data tersebut diperlukan dalam penulisan penelitian yang akan penulis lakukan kedepannya. Apabila tulisan ini membahas mengenai bagaimana upaya pendekatan konstruktif Indonesia dalam membantu proses transisi Myanmar dari otoriter ke

²¹ Dermawan, “Indonesia Constructive Engagement To Support Democracy in Myanmar.”

demokrasi, maka pada penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana runtuhnya demokrasi akibat kudeta dan bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta Myanmar 2021.

Tulisan terakhir merupakan bagian dari buku yang berjudul “*Indonesia Matters : Asia’s Emerging Democratic Power*” yang ditulis oleh Amitav Acharya.²² Dalam buku ini penulis menggunakan bagian ketiga dari buku dengan judul *Indonesia and The Regional Architecture*. Dalam bab ini Acharya menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peran penting di ASEAN terutama dalam penyelesaian permasalahan yang ada di kawasan. Indonesia bahkan memiliki gelar sebagai *primus inter pares* di kawasan ASEAN. Namun, peran aktif Indonesia di kawasan sempat terjeda pasca mundurnya Presiden Soeharto, dan kembali bangkit pada masa pemerintahan SBY. Bagi Indonesia ASEAN berperan besar dalam pencapaian kepentingan Indonesia melalui sentralitas ASEAN yang menguntungkan Indonesia. kemampuan ASEAN dalam pemenuhan kepentingan inilah yang mendorong Indonesia untuk terus berperan aktif dalam organisasi kawasan ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai landasan kebijakan luar negeri.

Tulisan ini berkontribusi sebagai rujukan bagi penulis dalam menjelaskan bagaimana peran Indonesia di ASEAN yang nantinya akan membantu penulis melakukan penelitian kedepannya. Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada analisis. Analisis dalam penelitian ini nantinya akan membahas mengenai kebijakan politik luar negeri serta peran Indonesia dalam

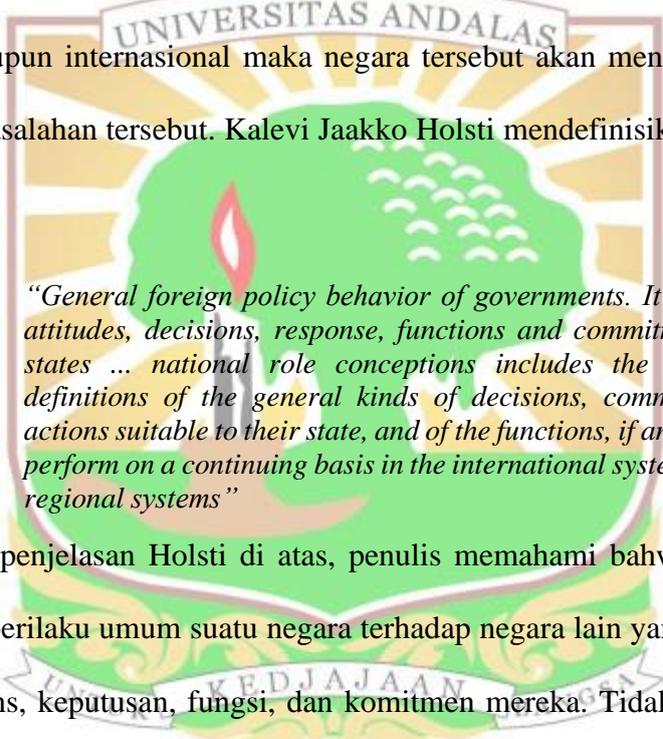
²² Acharya, “Indonesia and The Regional Architecture.”

upaya penyelesaian konflik kudeta Myanmar yang terjadi pada tahun 2021 sebagai bentuk pemenuhan kepentingan Indonesia.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Peranan Nasional

Peranan nasional merupakan sebuah tindakan yang didasari atas kebijakan luar negeri suatu negara. Apabila suatu negara tengah berada dalam permasalahan regional ataupun internasional maka negara tersebut akan menetapkan posisinya dalam permasalahan tersebut. Kalevi Jaakko Holsti mendefinisikan peran nasional sebagai:²³



“General foreign policy behavior of governments. It include patterns of attitudes, decisions, response, functions and commitment towards other states ... national role conceptions includes the policymakers' own definitions of the general kinds of decisions, commitments, rules and actions suitable to their state, and of the functions, if any, their state should perform on a continuing basis in the international system or in subordinate regional systems”

Dari penjelasan Holsti di atas, penulis memahami bahwa peran nasional merupakan perilaku umum suatu negara terhadap negara lain yang mencakup pola sikap, respons, keputusan, fungsi, dan komitmen mereka. Tidak hanya itu, peran nasional juga mencakup definisi yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan itu sendiri terkait jenis jenis keputusan umum, komitmen, aturan dan tindakan mereka yang sesuai dengan negara mereka, maupun fungsinya bagi negara mereka sendiri. Apabila hal tersebut sesuai dengan negara dan juga juga berfungsi bagi negara

²³ K J Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,” *International Studies Quarterly* 14, no.3 (April 5, 1970): 233–309.

mereka maka peran nasional harus dilakukan secara berkelanjutan di dalam sistem internasional atau di sistem yang lebih rendah.

Naomi Bailin Wish mendefinisikan konsep peran nasional atau *National Role Conception* sebagai persepsi pembuat kebijakan luar negeri terhadap posisi negaranya dalam sistem internasional, hal tersebut mencakup persepsi umum mengenai jenis umum keputusan, aturan, komitmen, dan fungsi jangka panjang dalam posisi internasional tersebut.²⁴ Kemudian, Wehner dan Thies mendefinisikan peran sebagai kombinasi dari konsepsi diri dan pengakuan sosial yang ditetapkan oleh orang lain.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep peran nasional merupakan hasil dari perilaku umum yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain guna menempatkan posisinya di sistem internasional baik itu melalui pengakuan negara itu sendiri maupun pengakuan yang diberikan oleh negara lain.

Layaknya peranan atau identitas seseorang dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah institusi, negara juga memiliki banyak identitas dalam sistem internasional. Peranan nasional atau identitas telah di jelaskan oleh Holsti berdasarkan tingkat kepasifan atau aktivitas suatu negara dalam kebijakan luar negerinya. Dalam buku yang berjudul "*National Role Conception in the Study of Foreign Policy*" Holsti memaparkan bahwa terdapat 17 variasi peranan nasional, di antaranya :²⁶

1. *Bastion of revolution-liberator*

²⁴ Naomi Bailin Wish, "Policy Makers and Foreign National Role Conceptions Their" 24, no. 4 (2014): 532–554.

²⁵ Leslie E Wehner and Cameron G Thies, "Role Theory , Narratives , and Interpretation : The Domestic Contestation of Roles 1" (2014): 411–436.

²⁶ K J Holsti, hal 260 – 271.

Pada peranan ini, beberapa pemerintah percaya bawasannya mereka memiliki tugas dalam mengatur atau memimpin berbagai jenis gerakan revolusi di luar negeri.

2. *Regional leader*

Disini peranan negara merujuk pada tanggung jawab atau tugas khusus yang dirasakan oleh suatu pemerintah untuk dirinya sendiri yang didasari oleh hubungan sebuah negara dengan negara lain di kawasannya. Dengan kata lain, regional leader merupakan peran yang dilakukan oleh negara karena status tertulisnya sebagai pemimpin dalam wilayah tertentu atau sektor tertentu.

3. *Regional protector*

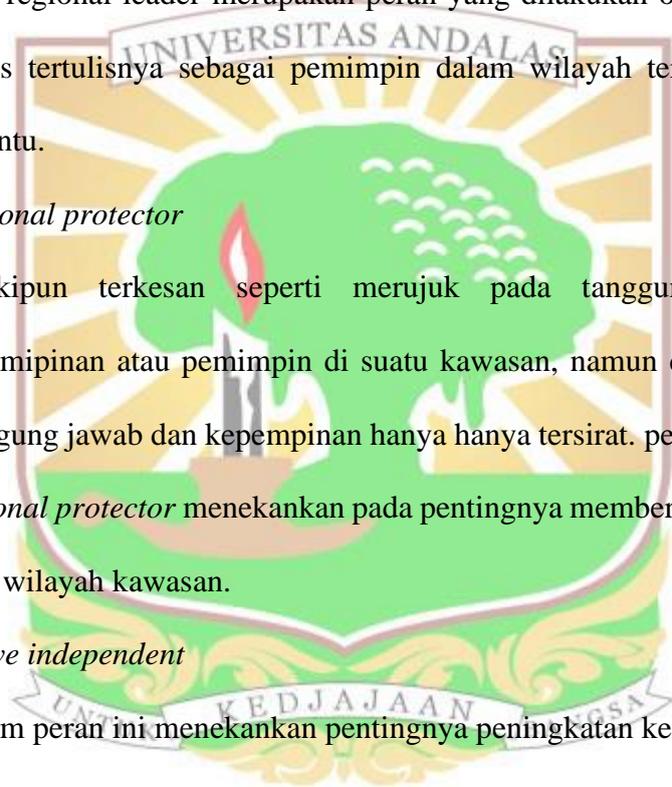
Meskipun terkesan seperti merujuk pada tanggung jawab suatu kepemimpinan atau pemimpin di suatu kawasan, namun dalam peranan ini tanggung jawab dan kepemimpinan hanya tersirat. Peranan negara pada *regional protector* menekankan pada pentingnya memberikan perlindungan bagi wilayah kawasan.

4. *Active independent*

Dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keikutsertaan negara dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sebanyak mungkin dan menjadi penengah dalam kasus konflik antar blok.

5. *Liberation supporter*

Berbeda dengan peran pertama yakni *bastion of the revolution*, peran ini tidak menunjukkan tanggung jawab formal untuk memimpin,



mengorganisir, ataupun secara fisik memberikan dukungan gerakan pembebasan di luar negeri. Dalam perannya sikap dan tindakan mereka tidak jelas, dan tidak terstruktur.

6. *Anti imperialist agent*

Peran negara disini sebagai 'agen' yang memperjuangkan kejahatan imperialisme.

7. *Defender of the faith*

Beberapa pemerintah memandang bahwa tujuan dan komitmen kebijakan luar negeri mereka adalah mempertahankan sistem nilai bukan dari serangan. Mereka berperan dan bertanggung jawab sebagai penjamin kemurnian ideologis bagi negara lain.

8. *Mediator-integrator*

Pada peran ini, negara merasa dan menganggap bahwa mereka mampu atau bertanggungjawab dalam memenuhi atau melakukan tugas khusus sebagai penengah untuk mendamaikan ataupun menyelesaikan konflik di negara lain. Dalam kasus ini mereka percaya dan menganggap bahwa mereka merupakan penyelesaian masalah di regional ataupun global.

9. *Regional-subsistem collaboration*

Disini negara berperan sebagai kolaborator yang membangun komitmen jangka panjang dalam upaya kerja sama agar dapat membentuk dan membangun komunitas yang lebih luas, bersatu, bekerja sama, dan berintegrasi.

10. *Developer*

Peran negara bertugas atau memiliki kewajiban tertentu guna membantu negara-negara berkembang.

11. Bridge

Konsepsi peran negara sebagai jembatan ini cenderung kabur, jika telah mengeluarkan kebijakan pun tidak dapat terlihat dengan jelas. Peran ini biasanya menyiratkan fungsi komunikasi, penerjemah, atau pembawa pesan dan informasi.

12. Faithful ally

Apabila pembuat suatu kebijakan menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu dengan berbagai macam cara namun, mereka tidak akan terlalu mengharapkan bantuan layaknya yang mereka berikan kepada pihak lain.

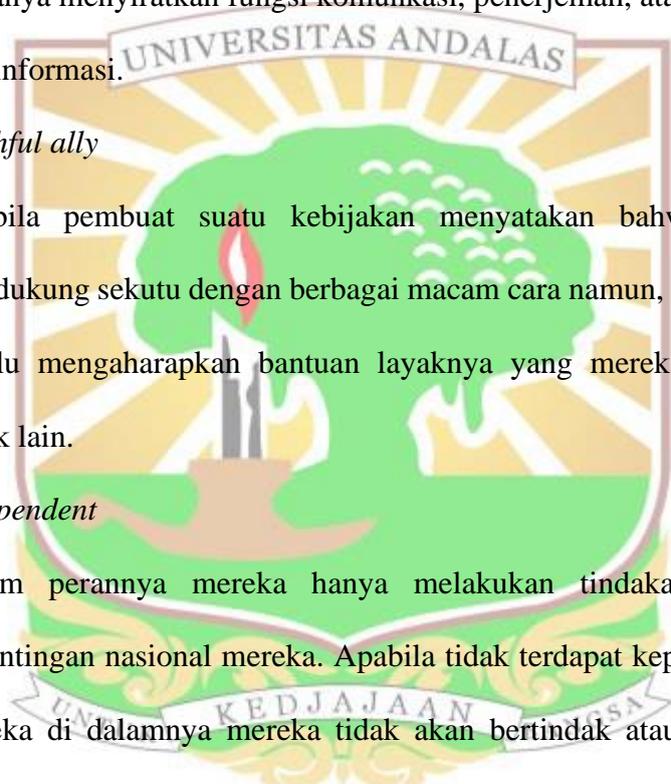
13. Independent

Dalam perannya mereka hanya melakukan tindakan dan mengejar kepentingan nasional mereka. Apabila tidak terdapat kepentingan nasional mereka di dalamnya mereka tidak akan bertindak ataupun menjalankan fungsi apapun disistem internasional.

14. Example

Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan juga mendapatkan pengaruh di sistem internasional dengan cara menjadi contoh atau teladan bagi negara-negara lain.

15. Internal development



Konsepsi peranan ini menekankan bahwa kepentingan utama negara adalah membangun negaranya sendiri. terdapat partisipasi yang rendah pada peran negara ini namun, hal tersebut tidak menghalangi kerja sama internasional terutama dalam bidang ekonomi dan teknis.

16. Isolate

Peran nasional terakhir ini menuntut untuk seminimal mungkin melakukan kontak dengan dunia internasional dalam bentuk apapun.

17. Protectee

Konsepsi peranan ini bukan merujuk pada peran negara namun lebih merujuk pada posisi suatu negara. dalam konsepsi ini negara tidak menunjukkan orintasi, fungsi dan tugasnya pada lingkungan eksternal namun menyinggung tanggung jawab negara lain untuk membela mereka.

Dari tujuh belas variasi peranan nasional dalam sistem internasional yang dipaparkan oleh Holsti di atas. Dari 17 peran diatas nantinya penulis akan menganalisis dengan cara mengkaitkannya dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam upayanya untuk menyelesaikan kudeta militer Myanmar. Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu akan memahami konsep yang dikemukakan oleh Holsti dengan mendalami pengertian dan menginterpretasikan makna dari variasi peranan nasional melalui contoh yang diberikan oleh Holsti dalam artikel yang ia keluarkan. Kemudian, peneliti akan mengumpulkan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Indonesia dan mengurut kebijakan tersebut secara kronologi waktu guna memetakan kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terkait peranan Indonesia dalam upaya penyelesaian

kudeta militer Myanmar tahun 2021. Setelah melaksanakan penelitian penulis akan mengkategorisasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan variasi peranan milik Holsti. Setelah melaksanakan penelitian, penulis menemukan bahwasannya dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar tahun 2021 Indonesia memiliki 2 peranan di dalamnya. Dalam 2 peranan nasional tersebut Indonesia berperan sebagai *regional protector, dan mediator-integrator*.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasari oleh hal-hal yang terjadi secara alamiah, pengumpulan data melalui penggabungan data, dan analisis data bersifat deduktif guna mendapatkan data yang sebenarnya.²⁷ Hal-hal yang terjadi secara alamiah dimaknai sebagai hal yang terjadi sebegitu adanya bukanlah hasil rekayasa tangan manusia atau eksperimen, sesuai dengan penelitian penulis yang mengkaji mengenai permasalahan sosial. Teknik analisis data yang penulis gunakan juga bersifat deduktif di mana dalam upaya menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian digunakan konsep sebagai alat untuk menjawabnya. Dalam teknik analisis data deduktif ini penelitian dipaparkan melalui data terlebih dahulu, kemudian data tersebut disesuaikan dengan teori yang telah ada. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan dan menjabarkan bagaimana permasalahan yang

²⁷ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

ada di Myanmar dan bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian permasalahan melalui langkah serta kebijakan yang telah di ambil oleh Indonesia.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Kudeta Myanmar yang terjadi pada tahun 2021. Namun, karena konflik kudeta militer masih belum usai hingga sekarang penulis akan menggunakan batasan penelitian berdasarkan kudeta militer Myanmar tahun 2021. Oleh karena itu, data yang penulis gunakan akan penulis batasi sejak awal dimulainya kudeta militer yakni dari Februari 2021 hingga Maret 2022.

1.8.3 Unit Analisis dan Tingkat Analisis

Mochtar Mas' oed menjelaskan bahwa unit analisis atau variabel dependen merupakan objek yang nantinya akan dianalisis, dideskripsikan dan diramalkan, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen adalah unit yang mempengaruhi unit analisis.²⁸ Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah peran Indonesia karena Indonesia merupakan objek yang akan penulis deskripsikan dalam penelitian ini, sedangkan unit eksplanasi penelitian ini adalah upaya penyelesaian kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Indonesia.

Mochtar Mas' oed dalam buku yang sama juga menjelaskan bahwa terdapat 5 tingkatan analisis, yakni: individu, kelompok, negara-bangsa, pengelompokan

²⁸ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 1990).

negara-negara, dan sistem internasional.²⁹ Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat negara-bangsa. tingkat unit analisis dan unit eksplanasi pada penelitian ini adalah korelasionis. Hal ini dikarenakan tingkat unit analisis dan unit eksplanasi berada di tingkat yang sama yakni negara-bangsa.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik *library research* atau melalui sumber data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data dan informasi yang sejalan dan relevan melalui buku, artikel jurnal, website, juga berita yang berkaitan dengan konflik Myanmar dan upaya yang dilakukan Indonesia.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel *report* yang dikeluarkan oleh ALTSEAN-BURMA dan AAPP atau *Assistance Association for Political Prisoners (Burma)*, jurnal *Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, pernyataan pers dari situs resmi yang dipublikasikan oleh setkab.go.id dan kemlu.go.id, dan berita *online* yang berasal dari banyak sumber seperti The Diplomat, Sindo, BBC News, CNN dan lainnya yang menyediakan data yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Kata kunci yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, Myanmar coup, peran Indonesia, upaya penyelesaian konflik, ASEAN, dan kudeta Myanmar.

1.8.5 Teknik Analisis Data

²⁹ Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*.

Menurut Miles dan Hubberman terdapat tiga alur yang dijalankan dalam melakukan proses menganalisis data di mana alur pertama adalah *data condensation* atau pemadatan data, alur kedua yaitu *data display* atau penyajian data, terakhir adalah *drawing and verifying conclusion* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁰

Data condensation atau pemadatan data merupakan tahapan yang berisikan mengenai pemilihan, pengumpulan, pengelompokkan, dan proses pengabstrakan yang nantinya data tersebut akan digunakan dalam penelitian. Dalam proses ini peneliti melakukan kondensasi data terkait Myanmar. Kemudian penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan konflik yang ada di Myanmar, relasi Indonesia dengan Myanmar. Lalu penulis akan mengumpulkan data mengenai bagaimana respons, tindakan, dan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia.

Tahap kedua yaitu *data display* atau penyajian data. Dalam tahapan ini penulis nantinya akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang sifatnya deskriptif. Deskripsi tersebut tertuang dalam penulisan BAB I sampai BAB IV. Pada penulisan BAB IV penulis akan menyajikan hasil analisis menggunakan konsep peranan nasional atau *National Role Conception* yang dikemukakan oleh K. J Holsti.

Terakhir yaitu *drawing and verifying conclusion* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini kesimpulan dan verifikasi mengenai hasil dari

³⁰ Johnny saldana Matthew B. Miles , Hubeerman, Michael, *Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (London: SAGE, 2014).

penelitian terletak pada BAB V yang menekankan kembali hasil dari penelitian mengenai peranan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik kudeta Myanmar pada tahun 2021.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KUDETA MILITER MYANMAR

Bab ini berisikan tentang awal mula mengenai kudeta militer Myanmar, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kudeta militer yang pertama kali terjadi di Myanmar yakni pada tahun 1962. Dalam kudeta militer pertama penulis juga akan menjelaskan beberapa demonstrasi atau pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Myanmar serta bentuk kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap rakyat Myanmar. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bagaimana kronologi serta dampak dari kudeta militer tahun 2021 baik dari segi nasional maupun internasional.

BAB III : HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MYANMAR

Bab ini berisikan Sejarah hubungan bilateral yang terjalin antar Indonesia dan Myanmar. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan sejarah hubungan bilateral keduanya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, penulis akan memaparkan sub bab yang berisikan hubungan kedua negara mulai dari masa

pemerintahan Soekarno hingga Joko Widodo serta hubungan keduanya pada saat kudeta militer tahun 2021.

BAB IV : PERAN INDONESIA DALAM UPAYA PENYELESAIAN KUDETA MILITER MYANMAR TAHUN 2021

Bab ini akan menyajikan hasil analisis serta menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik kudeta Militer di Myanmar tahun 2021.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan tentang rangkuman kesimpulan terpenting dan saran secara umum dalam penelitian yang telah dilakukan.

